

# DIMENSI GEOGRAFIS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN PERDESAAN <sup>1</sup>

LUKMAN HAKIM

AHMAD ZUBER

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

## *Abstract*

*This study attempts to analyze influence of geography dimension to rural poverty. Geography variable is deputized by village distance to district. Meanwhile, poverty variable used to family concept from BKKBN in each village. Study used to cross section data PODES 2006 executed by econometric method. This study consist of village on Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen and Klaten. Result of study indicate that geography dimension have a strong effect on rural poverty.*

Keyword: *poverty, geography, technology, enterpreneurship.*

## PENDAHULUAN

Beberapa studi kontemporer tentang kemiskinan seperti Mc. Arthur dan Sachs (2001) dan Sachs et.al (2002) menekankan pentingnya pendekatan geografis dalam Program Penanggulangan Kemiskinan (PK). Menurut mereka, posisi geografis sangat menentukan perkembangan kemajuan atau kemunduran sebuah masyarakat. Sebagai contoh pendekatan geografis adalah fonomena yang menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara miskin terdapat di daerah tropis yang membentang dari daratan Afrika, Asia, hingga Amerika Latin. Kemiskinan di wilayah ini menyebabkan tidak berkembangnya teknologi dan pembangunan. Sebaliknya bangsa-bangsa yang maju sebagian besar berada di daerah empat musim seperti Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, Rusia, Jepang dan China. Kemajuan di wilayah ini mendorong perkembangan teknologi dan pembangunan yang dapat meminimalkan kemiskinan. Fenomena ini membawa kepada kesimpulan bahwa masalah geografi merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kemajuan maupun kemiskinan suatu bangsa.

Studi di beberapa wilayah lain juga menunjukkan pentingnya faktor geografi dalam pemetaan masalah kemiskinan. Studi Bloom dan Sachs (1998) menguraikan keterkaitan antara geografi, demografi dan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Yang menyimpulkan bahwa faktor geografis menyebabkan permasalahan demogris yang mendorong peningkatan kemiskinan di Afrika. Sementara itu, studi Demuger et, al (1999) di China juga menemukan hal yang sama, yakni permasalahan geografi menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi regional yang pada gilirannya mendorong kemiskinan. Penelitian senada dilakukan oleh Sachs et, al (2002) dalam memahami pertumbuhan ekonomi India, yang menemukan bahwa problematika geografis yang menyebabkan kemiskinan sulit ditanggulangi.

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2008 “Model Pengembangan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan: Menurut Pandangan Pemangku Kepentingan” yang didanai oleh DP2M Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui kontrak No 017/SP2H/PP/DP2M/III/2008. Sudah dipublikasikan pada Media Ekonomi Fak. Ekonomi Usakti Jakarta (Jurnal Terakreditasi), Desember 2008.

Bagaimana dengan studi kemiskinan berdasarkan dimensi geografis di Indonesia? Sejauh ini masih sedikit, studi yang memfokuskan pengaruh dimensi geografis terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, studi ini akan menganalisis dampak dimensi geografis terhadap kemiskinan dengan mengambil kasus untuk wilayah desa-desa Eks Karesidenan Surakarta dengan menggunakan data Potensi Desa (Podes) 2006.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Kemiskinan**

Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah masalah deprivasi atau problematika kekurangan. Kemiskinan adalah sesuatu keadaan seseorang atau keluarga yang serba kekurangan (Sen dan Foster, 1997). Dari Definisi kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yakni absolut dan relatif. Kemiskinan absolut didefinisikan sebagai ketidakmampuan mencapai standar minimal dari kehidupan. Pengertian kebutuhan standar minimal berbeda-beda di setiap negara. Kemiskinan relatif pada sisi lain didefinisikan sebagai ketidakmampuan mencapai standar kebutuhan kontemporer, yang dihubungkan dengan kesejahteraan rata-rata atau pendapatan rata-rata masyarakat pada saat itu. Di Amerika Serikat pada tahun 1965, misalnya, orang dianggap miskin jika pendapatannya 1,5 dari pendapatan rata-rata. Demikian pula di negara sedang berkembang, orang miskin dikelompokkan 20 persen dari masyarakat berpendapatan rendah dalam distribusi pendapatan nasional (Schiller, 1998; Pernia dan Quibra, 1999:1869).

Setidaknya terdapat tiga sekolah pemikiran (*school of thought*) dalam mendefinisikan masalah kemiskinan. Pertama, pandangan kesejahteraan (*the welfarist school*), yang melihat bahwa kemiskinan adalah situasi masyarakat yang tidak dapat mencapai tingkat kesejahteraan tertentu. Paham ini dianut oleh para ekonom arus utama (*mainstream*) di mana solusinya adalah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang otomatis akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kedua, pandangan kebutuhan pokok (*the basic need school*) lebih berpandangan bahwa kelompok miskin adalah karena ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut pandangan ini solusi yang tepat adalah negara memberikan bantuan kepada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana serta sarana. Ketiga, pandangan kapabilitas (*the capability school*) yang melihat bahwa masalah kemiskinan karena kurangnya kapabilitas yang dimiliki oleh masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Maka, langkah untuk mengatasi kemiskinan dalam pandangan ini adalah mendorong peningkatan kapabilitas masyarakat (Asselin dan Dauphin, 2001; Daly dan Fane, 2002; Ravallion, 2005; Coudouel, et.al, 2006).

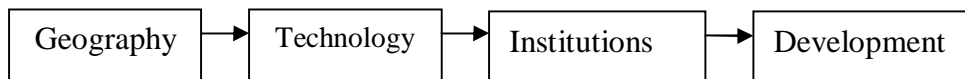
Selain itu, dalam strategi penanggulangan kemiskinan berkembang pendekatan geografis. Pendekatan ini menyatakan bahwa masalah kemiskinan berhubungan erat dengan persoalan geografis (Sach, et. Al, 2002). Menurut Mc Arthur dan Sachs (2001: 14) terdapat beberapa empat pola transmisi pendekatan geografi dan kelembagaan dalam mempengaruhi pembangunan. Pola I menunjukkan bahwa geografi akan berpengaruh terhadap kelembagaan, sedangkan kelembagaan akan mempengaruhi pembangunan. Pola II bergerak dari geografi mempengaruhi teknologi, sedangkan teknologogi berpengaruh terhadap kelembagaan dan terakhir berdampak terhadap pembangunan. Sementara pola III dan IV jalur pengaruh geografi terhadap pembangunan menjadi lebih rumit. Pola III dibagi menjadi dua jalur. Jalur pertama adalah geografi – teknologi – pembangunan, sementara jalur kedua, geografi dan teknologi mempengaruhi kelembagaan yang berpengaruh terhadap pembangunan. Sementara

Pola IV, proses utamanya sama dengan Pola III, namun diakhir jalur, pembangunan akan mempengaruhi teknologi dan seterusnya. Empat pola itu digambarkan sebagai berikut:

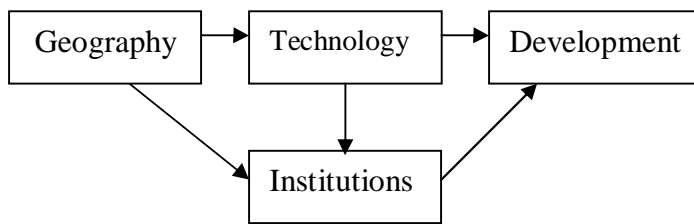
(a) Pola I



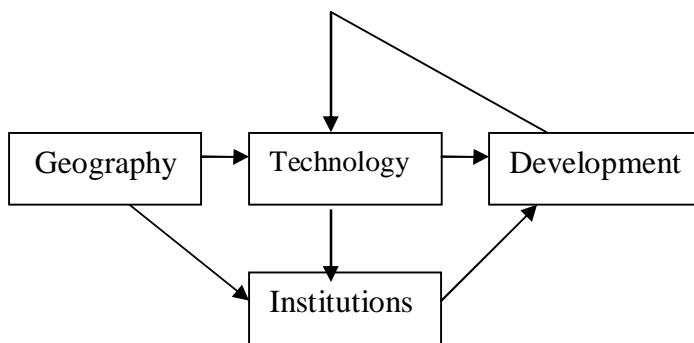
(b) Pola I



(c) Pola III



(d) Pola IV



Berdasarkan data yang adalah akan dibedakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di perdesaan desa yang berada di perkotaan dan di perdesaan. Perbandingan ini penting mengingat bahwa kemiskinan tidak hanya di perdesaan, melainkan juga diperkotaan. Berdasarkan pendekatan geografis ini dapat dibedakan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan perdesaan (*rural poverty*): (i) terbatasnya akses ke fasilitas tanah dan irigasi; (ii) lambatnya adaptasi terhadap teknologi moderen; (iii) terlalu besar beban yang ditanggung; (iv) terbatasnya modal manusia; (v) terkonsentrasi di daerah pinggiran; (vi)

terkonsentrasi pada minoritas etnis (Pernia dan Quibra, 1999: 1882). Kemiskinan perkotaan (*urban poverty*): (i) mempunyai keterbatasan terhadap akses sumber daya dan pelayanan; (ii) keterbatasan sumber daya manusia yang bermutu; (iii) terlalu besar beban yang ditanggung; (iv) rendahnya upah yang didapat; (v) banyaknya usaha kecil yang tidak terorganisasi (vi) banyaknya kelompok-kelompok yang tidak mempunyai kapabilitas (Pernia dan Quibra, 1999:1887).

Berikut ini akan diuraikan definisi kemiskinan menurut model garis kemiskinan-BPS, model keluarga sejahtera-BKKBN dan model Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **Model “Garis Kemiskinan” BPS**

BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Standar minimum itu diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*). Berdasarkan itu, dapat diketahui berapa banyak masyarakat miskin atau orang yang tingkat konsumsinya di bawah garis kemiskinan. Pada mulanya Garis kemiskinan (GK) diukur dengan melalui jumlah kalori minimal yang dikonsumsi masyarakat yakni sebesar 2100 kalori per orang per hari. Agar lebih memudahkan perhitungan jumlah kalori minimal itu diekivalensikan dalam bentuk rupiah yang setiap tahun diubah yang disesuaikan dengan perkembangan harga. Sebagai contoh garis kemiskinan pada tahun 1976 untuk kota adalah Rp4552 dan Desa sebesar Rp2849 pada tahun 1990 garis kemiskinan sudah meningkat 5 kalinya yakni masing-masing menjadi Rp20.614. Pada tahun 2003 garis kemiskinan sudah di atas Rp100.000 baik untuk kota maupun desa yakni masing-masing Rp138.805 dan Rp105.888 (Maksum, 2004a; 2004b).

Dalam mengeluarkan angka kemiskinan BPS melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada mulanya Susenas didesain tidak hanya untuk menghitung angka kemiskinan, melainkan survei konsumsi dan belanja pada tingkat rumah tangga. Definisi rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Selain itu, ada beberapa kondisi khusus yang juga dapat disebut rumah tangga yaitu orang yang menyewa kamar atau ruangan, keluarga terpisah tapi makan dari satu dapur, indekos yang pemondokannya kurang dari 10 orang, asrama termasuk panti asuhan dan lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya, masing-masing orang yang bersama-sama menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi mengurus makanannya sendiri-sendiri.

Susenas dalam bentuk yang sederhana telah dimulai pada tahun 1963 baru mencakup Pulau Jawa yang kemudian dilakukan pada 1964/1965, 1967, 1969/1970, 1976, 1978, dan 1979. Sejak tahun 1980, Susenas dilakukan setiap tahun, kecuali pada tahun 1983 dan 1988. Mulai tahun 1981, Susenas dibagi menjadi dua jenis, yaitu (a) Susenas Kor yang dibuat setiap tahun; (b) Susenas Modul yang dibuat setiap tiga tahun. Susenas Kor menyajikan data relatif umum, sementara Susenas Modul memberikan informasi lebih detil. Misalnya pada penyajian data mengenai komoditi pangan, pada Susenas Kor hanya sampai pada Sayuran, sementara dalam Susenas Modul mencakup data per komoditi dalam sayuran itu misalkan wortel dan tanaman sayur lainnya.

Dengan menggunakan data Susenas itu, BPS untuk pertama kalinya melaporkan perhitungan jumlah dan persentase pendudukan miskin pada tahun 1984. Pada tahun itu,

perhitungan jumlah dan dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1979-1981. Pada mulanya BPS hanya dapat menyajikan data jumlah dan persentase kemiskinan pada tingkat nasional, baru mulai tahun 1990 data dapat disajikan untuk tingkat propinsi, bahkan mulai tahun 1999 sudah sampai ke tingkat Kabupaten. Bahkan mulai tahun 1993 sampel rumah tangga Susenas mencapai lebih 200.000 rumah tangga di mana sebelumnya di bawah 65.000 rumah tangga. Selain, Susena, Pemerintah Daerah juga diperbolehkan melakukan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) bekerjasama dengan Kantor BPS setempat, seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Barat (2000). Metode Suseda sama dengan Susenas, hanya jumlah sampel yang disurvei lebih banyak (Cahyat, 2004).

### Model “Keluarga Sejahtera” BKKBN

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dari pada dari sudut kemiskinan. Unit survei yang dipergunakan oleh BKKBN adalah keluarga, sementara jika BPS menggunakan rumah tangga seperti telah disebutkan di atas. Survei BKKBN ini sebut juga sebagai Pendataan Keluarga yang telah dilakukan sejak tahun 1994. Pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan dari Pendataan Keluarga ini yaitu:

- Data demografi yaitu jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin
- Data keluarga berencana seperti pasangan usia subur (PUS), peserta KB, dll.
- Data individu seperti nomor identitas keluarga, nama dan alamat.
- Data tahapan keluarga sejahtera yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam keluarga pra sejahtera (sangat miskin), sejahtera I (miskin), II, III dan III plus.

Berdasarkan tahapan keluarga itu yang masuk kategori keluarga miskin adalah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Pendataan itu dimulai dari unit terkecil yakni Rukun Tetangga atau Dusun yang kemudian dapat diagregasikan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan tingkat nasional. Berikut ini adalah indikator keluarga miskin menurut BKKBN:

**Tabel 1. Indikator Keluarga Miskin Menurut BKKBN**

Indikator	Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)	Keluarga Sejahtera I (Miskin)
Indikator Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makan dua kali atau lebih sehari</li> <li>• Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian).</li> <li>• Bagian terluas lantai rumah bukan tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.</li> <li>• Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru</li> <li>• Luas lantai rumah paling kurang 8m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni</li> </ul>
Indikator non Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan ibadah</li> <li>• Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibadah teratur.</li> <li>• Sehat tiga bulan terakhir</li> <li>• Punya penghasilan tetap</li> <li>• Usia 10-60 dapat baca tulis huruf latin</li> <li>• Usia 6-15 tahun bersekolah</li> <li>• Anak lebih dari 2 orang, ber KB.</li> </ul>

Sumber: BKKBN, 2006

## Model “Indeks Pembangunan Manusia” UNDP

Pendekatan Pembangunan Manusia dikembangkan oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu United Nation Development Program (UNDP). Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan kemudian dikembangkan untuk lebih dari 120 negara. HDR adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Di sini pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan menjadi alat pembangunan. Dalam konsep ini menegaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Diantara pilihan-pilihan itu adalah hidup yang panjang dan sehat, mendapatkan pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Selain itu, pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak-hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.

Pemerintah Indonesia lewat Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) turut mengembangkan model ini. Sumber data HDR Indonesia berasal dari survei BPS, namun yang paling banyak dipakai adalah Susenas. HDR Indonesia dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. HDR terakhir adalah tahun 2004 yang menjelaskan keadaan tahun 1999 dan 2002. HDR mencakup empat indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI), Indeks Pembangunan Jender atau *Gender Development Index* (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau *Gender Empowerment Measure* (GEM) dan Indeks Kemiskinan Manusia atau *Human Poverty Index* (HPI) (tabel 2).

**Tabel 2. Indikator Indeks HDI, HPI, GDI dan GEM**

No	Jenis Indeks	Indikator
1.	HDI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat harapan hidup</li><li>• Tingkat melek huruf orang dewasa</li><li>• Rata-rata lama bersekolah</li><li>• Tingkat daya beli per kapita</li></ul>
2.	HPI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usai 40 tahun</li><li>• Tingkat buta huruf orang dewasa</li><li>• Persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan</li><li>• Persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan</li><li>• Persentase balita yang kurang makan</li></ul>
3.	GDI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan</li><li>• Tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan</li><li>• Rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan</li><li>• Perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan</li></ul>
4.	GEM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan</li><li>• Persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan</li><li>• Perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.</li></ul>

Sumber: Cahyat (2004), Manurung (2005).

## Studi-studi Sebelumnya

Sudah banyak studi tentang kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang. Pada generasi pertama yakni periode 1970-an sudah terdapat studi kemiskinan yang cukup monumental diantaranya adalah Singarimbun dan Penny (1976) yang mengangkat kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni Desa Sriharjo. Studi ini berhasil membangun sebuah kesadaran tentang masalah kemiskinan di perdesaan yang mempunyai dimensi kompleks baik ekonomi, sosial maupun kependudukan. Studi yang lebih umum dan konseptual tentang kemiskinan ditulis oleh Sajogyo (1978) di majalah Prisma yang sangat terkenal itu. Pada tulisan itu Sajogyo mengusulkan kriteria kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita. Untuk daerah perdesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240kg/orang/tahun dan untuk perkotaan kurang dari 360kg/orang/tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin. Esmara (1986) juga mengusulkan agar penentuan garis kemiskinan didasarkan jumlah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pokok per kapita selama setahun. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan akan barang-barang pokok seperti beras, ketela, daging, sayur, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, pada dekade 1980-an terdapat studi Arief (1978) serta Arief dan Sasono (1981) yang lebih melihat kemiskinan sebagai dampak dari keterpinggiran negara (*peripheral*) menghadapi negara-negara besar (*center*) yang melakukan praktik neo kolonialisme. Karya tulis ini mencoba menerapkan tesis dependensia seperti diterapkan para ilmuwan di Amerika Latin seperti Andre Gunder Frank dan Samir Amin, untuk kasus Indonesia. Karya Arief dan Sasono (1981) ini menengarai mewabahnya pandangan tesis dependensia yang kadang mengarah pada pandangan kiri baru (*new left*) di kalangan para intelektual dan mahasiswa kritis di Indonesia. Kritik umum terhadap pandangan kiri baru ini adalah sangat bagus sebagai sebuah analisis, namun sangat lemah dalam memberikan alternatif solusi. Ini yang menjadi titik pijak Sjahrir (1986) -salah seorang aktifis sosialis- untuk mencari pendekatan lain di luar tesis dependensia yakni dengan menyodorkan konsep kebutuhan pokok (*basic needs*). Dalam karya tulis itu, Sjahrir berargumen bahwa dengan pendekatan kebutuhan pokok setidaknya terdapat solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan mengambil kasus di Indonesia yakni program kredit tani (Bimas/Inmas), pendidikan (SD Inpres), kesehatan (Puskesmas). Studi lain yang cukup komprehensif tentang ketidakmerataan dan kemiskinan untuk setiap propinsi di Indonesia diedit oleh Hal Hill (1989). Buku ini dapat dianggap sebagai potret "ketidakmerataan" pada setiap propinsi di Indonesia.

Studi kemiskinan fase berikutnya terjadi pada dekade 1990-an yakni era di mana program penanggulangan kemiskinan yang lebih terfokus, terutama dengan semakin banyaknya bantuan luar negeri. Sumodingirat (1990) menganalisis beberapa program penanggulangan kemiskinan seperti Program Instruksi Presiden (Inpres), Program Pengembangan Wilayah (PPW), Program Pengembangan Wilayah Terpadu Swadana (PPWT Swadana), Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT). Secara umum studi ini menyimpulkan bahwa program-program ini telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Demikian halnya tulisan dari Kartasmita, (1997) juga menyoroti keberhasilan program anti kemiskinan yang telah diterapkan pemerintah pada dekade 1990-an itu.

Studi yang paling banyak tentang kemiskinan justru terjadi pada masa setelah krisis ekonomi 1997. Studi-studi pada era ini mempunyai fokus yang sangat beragam. Namun sebagian besar dari studi ini masih berkutat dengan masalah-masalah perhitungan kemiskinan seperti yang dilakukan oleh yang menggunakan pendekatan diskriptif pada masa krisis

diantaranya dilakukan oleh Pradhan, et.al (2000); Alatas, et. al (2003); Oktaviani, (2003); Alisjahbana dan Yusuf (2003); Sumarto, et. al (2004); dan Suryadarma, et.al (2005, 2006).

Tulisan lain yang bersifat evaluasi program-program anti kemiskinan pada era ini juga dilakukan oleh para pengamat asing diantara dilakukan oleh Akita dan Szeto (2000), Booth (2000), Karya tulis ini mengevaluasi Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang diterapkan pada periode 1994-1996, dengan temuan bahwa program ini berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Beberapa studi yang memfokuskan pada evaluasi program kemiskinan telah dilakukan oleh Mubyarto (2000) yang memfokuskan kepada evaluasi tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS). Hastuti (2006) khusus mengevaluasi tentang program BLT/SLT. Studi Hakim et. Al (2005) dan Sumadi et.al (2005) baru sebatas diskusi diskriptif ekonomis tentang program-program kemiskinan, namun tidak mengarah kepada penyusunan model evaluasi program.

Kelompok peneliti yang lebih memfokuskan pada pemetaan seperti dilakukan oleh Suryahadi, et.al (2005) dan Putro et.al (2005) yang menggunakan metode GIS untuk memetakan kemiskinan di Indonesia. Seperti studi Suryahadi et.al (2005) menggunakan GIS untuk memetakan kemiskinan di seluruh Indonesia berdasarkan propinsi dan kabupaten yang meliputi Pulau Sumatera; Jawa; Bali dan Nusa Tenggara; Kalimantan; Sulawesi; Maluku dan Papua. Sementara itu, studi Putro et al (2005) menggunakan GIS untuk memetakan Pulau Jawa dan Bali berdasarkan tingkat propinsi dan kabupaten.

Studi-studi lain yang memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Balisacan et, al (2003) dan Timmer (2004). Studi Timmer (2004) menggunakan data panel untuk kasus Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, India, Pakistan, Korea Selatan dan China. Studi ini membandingkan log indeks gini dan pertumbuhan GDP masing-masing variabel dependennya, sementara variabel independennya adalah logaritma pangsa sektor pertanian; produktivitas tenaga kerja; tabungan; sektor informal; margin sektor pertanian; proporsi konsumsi kalori; proporsi konsumsi makanan berenergi. Hasil dari studi ini adalah variabel-variabel pangsa sektor pertanian; produktivitas tenaga kerja; tabungan; sektor informal; margin sektor pertanian mempunyai hubungan yang erat terhadap kesejahteraan, hanya variabel proporsi konsumsi kalori; proporsi konsumsi makanan berenergi yang tidak sesuai dengan teori.

Sementara studi Balisacan et. al (2003) menggunakan logaritma rata-rata pendapatan perkapita untuk 20 persen masyarakat berpendapatan rendah sebagai variabel dependen. Variabel independen dalam studi ini adalah rata-rata pendapatan nasional (Y); modal manusia atau *human capital* (tahun sekolah, masyarakat buta huruf, jarak ke sekolah); nilai tukar perdagangan atau *term of trade* (rasio antara deflator output dari sektor pertanian dan non pertanian); teknologi (proporsi rata-rata desa yang telah mempunyai telepon umum, televisi umum, kantor pos, agen surat kabar, pelanggan PLN); keuangan (proporsi rata-rata bank atau koperasi di desa); jalan (proporsi jalan desa yang telah diaspal); gas dan minyak (proporsi gas dan minyak dalam output propinsi).

Terdapat beberapa temuan penting dari studi Balisacan et. al (2003). Pertama, peningkatan modal manusia akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, investasi dalam bidang pendidikan akan meningkatkan pertumbuhan dan secara otomatis akan mengurangi kemiskinan. Kedua, perkembangan teknologi akan meningkatkan pertambahan pendapatan dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Ketiga, sektor keuangan tidak mempunyai dampak terhadap kemiskinan. Karena sebagian besar kelompok miskin di perdesaan tidak mampu



memanfaatkan keberadaannya dari adanya bank ataupun koperasi desa. Keempat, keadaan jalan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan, melalui peningkatan pendapatan yang kemungkinan dapat mengurangi kemiskinan. Keempat, demikian juga kepemilikan terhadap minyak dan gas juga akan mengurangi kemiskinan secara tidak langsung.

## METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan variabel-variabel dalam studi yang dilakukan oleh Balisacan et al (2003) dan Timmer (2004) itu, kami mencoba untuk menerapkan untuk kasus wilayah Eks-Karesidenan Surakarta. Variabel dependen yang digunakan dalam studi ini adalah jumlah Keluarga Miskin tiap desa yang diambil dari data Podes 2006. Definisi Keluarga Miskin dalam Podes 2006 mengacu definisi BKKBN yakni penjumlahan dari jumlah Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin) dan Keluarga Sejahtera I (miskin). Sementara itu, variabel-variabel independen terdiri atas geografis menggunakan jarak dari desa ke kecamatan; teknologi diproksi oleh jumlah keluarga yang telah berlangganan listrik; ketersediaan sumber daya alam yang diwakili oleh jumlah lahan pertanian yang tersedia; keswastaan diwakili oleh jumlah pengusah kecil di desa.

Sementara itu secara teoretis hubungan antar variabel dapat dikemukakan sebagai berikut. Hubungan jarak geografis dengan kemiskinan adalah positif atau searah, artinya semakin jauh jarak sebuah desa terhadap kecamatannya, maka desa itu akan semakin miskin. Sementara hubungan variabel lain yakni teknologi, peluang usaha dan kewirausahaan adalah negatif atau berlawanan arah. Artinya semakin besar masyarakat perdesaan mempunyai akses terhadap teknologi, ketersediaan sumber daya alam dan kewirausahaan maka akan semakin mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut permodelan kemiskinan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KKM = f(JC, L, IK, LP)$$

Keterangan :

KKM = adalah jumlah KK miskin di tiap-tiap desa

JC = variabel geografis diproksi oleh jarak dari desa ke kecamatan

L = variabel teknologi diproksi oleh jumlah keluarga yang berlangganan listrik

LP = variabel ketersediaan sumber daya alam yang diproksi oleh jumlah lahan pertanian yang masih ada di desa tersebut.

IK = variabel kewirausahaan yang diproksi oleh jumlah usaha kecil di desa ini.

**Tabel 3. Hubungan Teoritis Antar Variabel**

Variabel	JC	L	LP	IK
KKM	+	-	-	-

### Sumber Data

Data sekunder tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dari instansi/dinas/kantor/badan yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di Kab/Kota, seperti: Badan Pusat Statistik, BAPEDA, Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Dinas Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera, Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal, Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya.

Data Potensi Desas (Podes) Tahun 2006 yang berisi profil desa se Subosuka Wonosraten. Profil itu mencakup aspek kelembagaan, penduduk dan kemiskinan, ekonomi, sosial, infrastruktur. Yang dapat menggambarkan secara holistik perkembangan perdesaan dewasa ini, terutama untuk wilayah Eks-Karesidenan Surakarta. Data ini merupakan hasil survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2005 yang lalu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil dan pembahasan model ekonometri. Pertama kali akan disampaikan terlebih dahulu diskripsi obyek penelitian dan uji normalitas data. Berikutnya adalah menampilkan hasil olahan ekonometri secara lengkap. Dilanjutkan dengan uji statistik, uji asumsi klasik dan interpretasi ekonomi.

### Deskripsi Obyek Penelitian

Berdasarkan pengolahan data Podes 2006 terlihat bahwa persentase keluarga miskin di Wilayah Subosuka Wonosraten paling besar adalah Kab. Boyolali dan Kab. Sragen yang mencapai 65%. Sementara, Kab. Wonogiri dan Sukoharjo pada urutan berikutnya masing-masing mencapai 54% dan 45%. Tingkat kemiskinan yang relatif rendah adalah Kab. Klaten (37%), Kab. Karanganyar (34%) dan Kota Surakarta mencapai 33%.

**Tabel 4. Kemiskinan di Wilayah Subosuka Wonosraten 2006**

No	Kabupaten/Kota	KK Miskin	Keluarga	Persentase
1.	Surakarta	42974	130900	33%
2.	Boyolali	157884	244637	65%
3.	Sukoharjo	90701	202930	45%
4.	Karanganyar	69493	205675	34%
5.	Wonogiri	133269	248965	54%
6.	Sragen	163621	252012	65%
7.	Klaten	124382	331899	37%

Sumber: Diolah dari Podes 2006

Berdasarkan uji normalitas data dengan menggunakan metode Jarque-Bera terlihat bahwa semua persamaan yakni untuk Subosuka Wonosraten, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten lolos uji tersebut.

**Tabel 5. Uji Normalitas**

No	Daerah	Jarque-Bera	Probability	Keterangan
1.	Subosuka Wonosraten	857,341	0,000	Lolos
2.	Kota Surakarta	102,146	0,000	Lolos
3.	Kab. Boyolali	30,336	0,000	Lolos
4.	Kab. Sukoharjo	12,228	0,002	Lolos
5.	Kab. Karanganyar	7,074	0,029	Lolos
6.	Kab. Wonogiri	172,987	0,000	Lolos
7.	Kab. Sragen	9,036	0,010	Lolos
8.	Kab. Klaten	50,514	0,000	Lolos

## Uji Statistik

Berdasarkan uji t terlihat bahwa untuk semua persamaan Subosuka Wonosraten semua lolos baik JC, L, LP dan IK, karena t-test lebih besar dari pada t-tabel 1,68. Sementara untuk persamaan Surakarta yang lolos uji t adalah variabel JC dan L. Untuk persamaan Boyolali yang lolos uji t adalah variabel JC, L, dan LP, sedangkan persamaan Sukoharjo yang lolos uji t adalah variabel JC, L dan LP. Sementara itu, persamaan Karanganyar yang lolos uji t adalah variabel JC, L, LP dan IK., sedangkan untuk persamaan Wonogiri yang lolos uji t hanyalah LP dan IK. Untuk persamaan Sragen yang lolos uji t adalah variabel L dan LP, sedangkan untuk persamaan Klaten semua lolos dari JC, L, LP dan IK.

Sementara itu, berdasarkan uji F terlihat bahwa semua lolos dengan F-tabel 2,47. Karena masing-masing persamaan mempunyai F-test di atas F-tabel tersebut yakni persamaan Subosuka Wonosraten (178,133); Surakarta (35,375); Boyolali (46,385); Sukoharjo (11,285); Karanganyar (19,685); Wonogiri (4,830); Sragen (12,630) dan Klaten (50,681).

Uji *goodness of fit* dengan menggunakan nilai  $R^2$  terlihat bahwa sebagian besar persamaan di bawah 0,5, hanya persamaan Surakarta di atas 0,5 yakni mencapai 0,75. Ini bermakna bahwa persamaan ini hanya dapat menjelaskan 0,75%, sedangkan sisanya 0,25% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan ini. Diikuti dengan persamaan Boyolali (0,41); Klaten (0,33); Karanganyar (0,314); Subosuka Wonosraten (0,313); Sukoharjo (0,21); Sragen (0,199) dan Wonogiri (0,062) (Tabel 6).

**Tabel 6 Hasil Pengolahan Data Model Ekonometri**

Variabel	Subosuka Wonosraten	Surakarta	Boyolali	Sukoharjo	Karanganyar	Wonogiri	Sragen	Klaten
JC	0.137856 (5.018999)	-57.19733 (-1.619897)	8.314723 (10.01708)	13.85201 (1.823750)	14.70295 (2.835134)	3.848014 (0.872686)	-1.697654 (-0.326063)	3.231001 (3.060263)
L	0.273017 (24.95991)	0.380434 (10.23708)	0.404462 (10.54485)	0.164445 (5.212063)	0.168571 (6.720776)	0.067370 (1.347598)	0.148406 (4.734791)	0.293489 (10.93295)
LP	0.465791 (10.15955)	2.655376 (0.127875)	0.395545 (3.666378)	1.040183 (4.263945)	0.500721 (2.192853)	0.095702 (1.719209)	0.679447 (6.315241)	0.800107 (5.175081)
IK	0.213280 (2.708328)	-1.177061 (-0.385612)	-0.094827 (-0.408101)	0.589236 (1.356434)	0.465361 (2.965655)	0.477435 (3.442491)	-0.036728 (-0.303496)	0.355792 (3.430444)
C	235.2746 (18.32689)	137.2869 (0.996947)	55.91610 (1.338832)	280.9214 (5.738808)	71.68196 (1.704076)	341.8053 (7.381028)	594.7540 (13.39826)	8.100031 (0.266833)
R <sup>2</sup>	0.313679	0.754671	0.414581	0.218982	0.314033	0.062673	0.199278	0.338594
F-Stat	178.1330	35.37587	46.38569	11.28533	19.68519	4.830868	12.63028	50.68110

Ket: Angka di dalam kurung adalah t-statistik, (...): hubungan variabel yang lolos uji t.

### Uji Asumsi Klasik

Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan uji White, persamaan yang lolos heterokedastisitas adalah Subosuka Wonosraten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten. Yang tidak lolos adalah persamaan Wonogiri dan Sragen. Seperti terlihat dalam sebagai berikut:

**Tabel 7. Uji Heterokedastisitas**

No	Daerah	F-statistic	Obs*R-squared	Keterangan
1.	Subosuka Wonosraten	46.39387	301.3679	Tidak Hetero
2.	Kota Surakarta	5.154975	25.26712	Tidak Hetero
3.	Kab. Boyolali	8.103031	53.61454	Tidak Hetero
4.	Kab. Sukoharjo	3.469652	24.93921	Tidak Hetero
5.	Kab. Karanganyar	2.496462	18.80597	Tidak Hetero
6.	Kab. Wonogiri	1.016214	8.153846	Hetero
7.	Kab. Sragen	0.338637	2.793590	Hetero
8.	Kab. Klaten	16.19679	99.62013	Tidak Hetero

Uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi menggunakan aturan yang sederhana (*rule of thumb*), multikolinieritas terjadi jika terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen yakni di atas 0,85. Sebaliknya jika korelasi antar variabel independen rendah maka dapat dianggap tidak terdapat multikolinieritas. Untuk persamaan Subosuka Wonosraten, Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten semuanya mempunyai korelasi antar variabel yang rendah, maka dapat di sini dapat dinyatakan bahwa seluruh persamaan yang diestimasi tidak terdapat masalah multikolinieritas.

**Tabel 8. Uji Otokorelasi**

No	Daerah	F-statistic	Obs*R-squared	Keterangan
1.	Subosuka Wonosraten	511.9761	620.4924	Tidak Otokorelasi
2.	Kota Surakarta	0.574311	1.297487	Otokorelasi
3.	Kab. Boyolali	19.33574	34.57070	Tidak Otokorelasi
4.	Kab. Sukoharjo	31.86902	47.50206	Tidak Otokorelasi
5.	Kab. Karanganyar	12.85483	23.25184	Tidak Otokorelasi
6.	Kab. Wonogiri	65.98254	92.60374	Tidak Otokorelasi
7.	Kab. Sragen	7.113467	13.74922	Tidak Otokorelasi
8.	Kab. Klaten	70.55272	105.7423	Tidak Otokorelasi

Berdasarkan uji otokorelasi Breusch-Godfrey, hampir semua persamaan tidak terdapat otokorelasi yakni persamaan Subosuka Wonosraten, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten. Sementara yang diindikasikan terdapat otokorelasi adalah Surakarta (Tabel 8).

### Interpretasi ekonomi

Secara umum, hasil studi ini berkesesuaian dengan teori yakni dimensi geografis mempunyai hubungan positif terhadap kemiskinan. Seperti ditunjukkan dengan hasil untuk kasus desa di seluruh Eks-Karesidenan Surakarta yang bertanda positif. Ini menunjukkan bahwa dimensi geografis mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemiskinan pada seluruh desa di Eks Karesidenan Surakarta. Temuan ini menegaskan bahwa dimensi geografis sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini sekaligus membenarkan tesis Bloom dan Sachs (1998). Demuger et, al (1999) dan Sachs et, al (2002) yang menyatakan bahwa dimensi geografis mempunyai dampak besar terhadap kemiskinan.

**Tabel 9. Perbandingan Hubungan Teoritis dan Hasil**

	Geografis (JC)	Teknologi (L)	Ketersediaan SDA (LP)	Kewirausahaan IK
Teoritis	+	-	-	-
Subosukowanostren	+	+	+	+
Surakarta	-	+	+*)	-*)
Boyolali	+	+	-	-*)
Sukoharjo	+	+	+	+*)
Karanganyar	+	+	+	+
Wonogiri	+*)	+*)	+	+
Sragen	-*)	+	+	-*)
Klaten	+	+	+	+

\*)= tidak signifikan.

Temuan ini akan lebih menarik, jika dilihat pada tiap-tiap kabupaten/kota. Secara umum sebagian besar Kabupaten yakni Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Klaten hubungan dimensi geografis terhadap kemiskinan adalah sesuai dengan teori yakni hubungannya positif. Dengan kata lain, semakin jauh jarak desa terhadap kecamatan, maka desa tersebut akan semakin miskin. Penjelasaannya adalah pada kelima kabupaten ini masing terdapat desa-desa yang berada di pegunungan dan belum mempunyai akses jalan cukup ke kecamatan. Sementara, hanya Kota Surakarta dan Kab. Sragen yang mempunyai hubungan negatif antara dimensi geografis terhadap kemiskinan. Penjelasaannya jelas, bahwa dalam kasus Kota Surakarta dengan karakter perkotaannya, menyebabkan masalah geografis tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Demikian halnya untuk Kab. Sragen, letaknya kabupaten yang ditengah-tengah wilayah Eks- Karesidenan Surakarta, menyebabkan semua desa relatif mempunyai akses terhadap kecamatan di sekitarnya.

Sementara itu, dimensi teknologi berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada setiap persamaan baik untuk Eks Karesidenan Surakarta maupun tiap-tiap Kab/Kota. Secara teoritis seharusnya pengaruh dimensi teknologi (berlangganan PLN) terhadap kemiskinan adalah negatif. Atau semakin besar teknologi justru akan mengurangi kemiskinan. Demikian halnya, ketersediaan sumber daya alam yang diwakili oleh besarnya lahan pertanian (LP) di perdesaan hubungannya dengan kemiskinan juga tidak sesuai teori untuk semua persamaan kecuali di Kab. Boyolali. Seharusnya hubungan ketersediaan sumber daya alam terhadap kemiskinan adalah positif, namun hasil penelitian adalah negatif. Salah satu penjelasannya adalah karena keluarga miskin tidak mempunyai akses untuk berlangganan listrik, sekaligus tidak mempunyai akses terhadap pengelolaan lahan pertanian.

Sementara hasil yang tidak kalah menarik dari studi ini adalah pengaruh kewirausahaan terhadap kemiskinan. Secara umum seperti ditunjukkan untuk seluruh desa di

Eks-Karesidenan Surakarta hubungannya kewirausahaan terhadap kemiskinan adalah positif, secara teoretis seharusnya negatif. Kendatipun secara statistik tidak signifikan, pengaruh kewirausahaan terhadap kemiskinan yang sesuai dengan teori yang berlawanan arah atau semakin banyak usaha kecil akan semakin menurunkan kemiskinan hanya terdapat di Kota Surakarta, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen. Penjelasan adalah usaha kecil yang relatif masih lemah di desa, belum sanggup mendukung pengentasan kemiskinan perdesaan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Studi ini membenarkan pendekatan dimensi geografis terhadap kemiskinan seperti yang dikemukakan oleh Bloom dan Sachs (1998). Demuger et, al (1999) dan Sachs et, al (2002) yang menyatakan bahwa dimensi geografis berpengaruh terhadap kemiskinan. Hasil studi menunjukkan bahwa dimensi geografi pada daerah penelitian yakni desa-desa di Eks Karesidenan Surakarta mempunyai dampak positif terhadap kemiskinan perdesaan. Dengan kata lain, semakin jauh jarak desa dengan pusat pemerintahan terdekat (kecamatan), maka kemiskinan akan semakin besar.

Sementara itu, dimensi teknologi dan ketersediaan sumber daya alam mempunyai pengaruh berkebalikan dengan teori. Seharusnya hubungannya adalah negatif, namun hasil penelitiannya adalah positif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin belum dapat mengakses teknologi (listrik PLN) dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam (lahan pertanian), sehingga adanya teknologi dan ketersediaan sumber daya alam masih meningkatkan keluarga miskin.

Aspek kewirausahaan masih relatif rendah di kalangan perdesaan, sehingga studi ini menemukan bahwa kewirausahaan belum dapat menurunkan kemiskinan di perdesaan. Atau dengan kata lain usaha kecil yang relatif masih lemah di desa, belum sanggup mendukung pengentasan kemiskinan perdesaan.

### **Saran**

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa dimensi geografis harus lebih diperhatikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Ini membawa konsekuensi bahwa perbaikan terhadap infrastruktur yang menghubungkan antar daerah menjadi sangat penting. Dengan perbaikan terhadap infrastruktur diharapkan akses bagi masyarakat untuk berhubungan dengan pusat-pusat pertumbuhan akan semakin terbuka. Selain itu, diperlukan juga kebijakan anti kemiskinan atau kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (*pro poor growth*) yang memperhatikan dimensi geografis, teknologi, dan kewirausahaan masyarakat perdesaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akita, Takahiro dan Jesse J.K. Szeto. 2000. "Inpres Desa Tertinggal (IDT) Program and Indonesian Regional Inequality". *Asian Economic Journal*. Vol. 14. No.2.
- Alatas, Vivi dan Menno Pradhan. 2003. "Geographic Targeting in Indonesia". The 5<sup>th</sup> IRSA International Conference, "Regional Development in a Decentralized Era: Public Service, Poverty, and the Environment", July 18-19, Bandung.
- Alisjahbana, Armida S dan Arief Anshory Yusuf. 2003. "Poverty Dynamics in Indonesia: Preliminary Evidence from Longitudinal Data". The 5<sup>th</sup> IRSA International Conference, July 18-19, Bandung.

- Arief, Sritua dan Adi Sasono. 1981. *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Arief, Sritua. 1978. *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Asselin, Louis-Marie dan Anyck Dauphin. 2001. "Poverty Measurement: A Conceptual Framework." Working Paper Canadian Centre for International Studies and Cooperation (CECI).
- Balisacan, Arsenio M, Ernesto M. Pernia dan Abuzar Asra. 2003. "Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(3), December, pp.329-353.
- Bloom, David E dan Jeffrey D. Sachs. 1998. "Geography, Demography, and Economic Growth in Africa." *Brooking Paper in Economic Activity*, 2, pp. 207-295.
- Booth, Anne. 2000. "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), April.
- Cahyat, Ade. 2004. "Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia." Governance Brief, CIFOR, No.2, Nop.
- Coudouel, Aline, Anis A. Dani, and Stefano Paternostro. 2006. *Poverty and Social Impact Analysis of Reform: Lesson and Examples from Implementation*. Washington: The World Bank.
- Daly, Anne dan George Fane. 2002. "Anti-Poverty Programs in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 38(2), December.
- Demuger, Sylvie, Jeffrey D. Sachs, Wing Thye Woo, Shuming Bao, Gene Chang, Andrew Mellinger. 2002. "Geography, Economic Policy and Regional Development in China." *Asian Economic Paper*, 1(1). Pp. 146-197.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: SAGE Publication.
- Esmara, Hendra. 1986. *Politik Perencanaan Pembangunan: Teori, Kebijakan, dan Prospek*. Gramedia, Jakarta.
- Gallup, John Luke, Jeffrey D. Sachs, dan Andrew D. Mellinger. 1999. "Geography and Economic Development." *International Regional Science Review*, 22(2), pp. 179-232.
- Hakim, Lukman, Daerobi, Sumardi. 2005. "Kajian Pemetaan dan Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Surakarta 2005." Laporan Penelitian, PPEP FE UNS, Bapeda Kota Surakarta, dan Kantor Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Jakarta.
- Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhu Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiayati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, R. Justin Sodo, Sami Bazzi, Sudarno Sumarto. 2006. "Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota." Smeru Working Paper, January.
- Hill, Hall (ed). 1989. *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*. Singapore: Oxford University Press.



- Kartasasmita, Ginanjar 1997. "Power dan Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat", *Perencanaan Pembangunan*, No. 07. Januari.
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maksum, Choiril. 2004a. "Official Poverty Measurement in Indonesia." Paper Presented 2004 International Conference on Official Poverty Statistics, Mandaluyong City, Philippines, 4-6 October.
- Maksum, Choiril. 2004b. "Development of Poverty Statistics in Indonesia: Some Notes on BPS Contribution in Poverty Allevation." Mimeo, BPS.
- Manurung, Martin. 2005. "Measuring Poverty: The Prominent and Alternative Indicators". Mimeo, University of East Anglia, Desember.
- Mc. Arthur, John W dan Jeffrey D. Sachs. 2001. "Institution and Geography: Comment on Acemoglu, Johnson and Robinson." NBER Working Paper Series No: w8114.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Myrdal, Gunnar. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. Massachusetts: The Colonial Press.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Oktaviani, Dian. 2003. "Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks FGT." *Media Ekonomi*, 9(3), Desember.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1993. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirits Transforming The Public Sectors*. New York: Plume Book
- Pernia, Ernesto M dan M.G. Quibra. 1999. "Poverty in Developing Countries." Dalam Paul Cheshire dan Edwin S. Mills. *Handbook of Regional and Urban Economics Vol 3*. Amsterdam: Elsevier.
- Pradhan, Menno, Asep Suryahadi, Sudarmo Sumarto dan Lant Pritchett. 2000. "Measurements of Poverty in Indonesia: 1996, 1999, and Beyond". World Bank Working Paper Policy Research No.2438., September.
- Putro, Rawidyo Tetuko dan Hery Sulisty Jati. 2005. "Upaya Pengentasan Kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali 2003". Paper dipresentasikan dalam Dies ke-25 Program MSi FE UGM.
- Ravallion, Martin. 2005. "Evaluating Anti-Poverty Program." World Bank Policy Research Working Papers 3625, June.
- Sachs, Jeffrey D, Nirupam Bajpai dan Ananthi Ramiah. 2002. "Understanding Regional Economy Growth in India." Center for International Development (CID) Harvard University No.88, March.
- Sajogyo. 1978."Lapisan Masyarakat yang Paling Lemah di Perdesaan Jawa." *Prisma*, No 3.
- Schiller, Bradley R. 1998. *The Economics of Poverty and Discrimination*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sen, Amartya dan James Foster. 1997. *On Economic Inequality*. Oxford: Oxford University Press.

- Singarimbum, Masri dan David Penny. 1976. *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sjahrir. 1986. *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok: Sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta: LP3ES.
- Sumadiningrat, Gunawan. 1990. "Pemerataan Pembangunan." Makalah disampaikan pada Kongres ISEI ke XI, Bandung, 22-25 Agustus.
- Sumardi, Riwi Sumantyo, Lukman Hakim. 2005. "Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2005. Laporan Penelitian, PIPW LPPM UNS dan Bapeda Kab. Karanganyar.
- Sumarto, Sudarno, Asep Suryahadi dan Alex Arifianto. 2004."Governance and Poverty Reduction: Evidence from Newly Decentralized Indonesia." Smeru Working Paper. March.
- Suryadarma, Daniel, Rima Prama Artha, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto. 2005. "A Reassessment of Inequality and its Role in Poverty Reduction in Indonesia." Smeru Working Paper. January.
- Suryadarma, Daniel, Wenefrida Widyanti, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto. 2006. "From Acces to Income: Regional and Ethnic Inequality in Indonesia." Smeru Working Paper, May.
- Suryahadi, Asep Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, Sudarno Sumarto. 2005. "Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs (Book 1: Technical Report)". Smeru Working Paper. February.
- Timmer, Peter. C. 2004. "The Road to Pro-Poor Growth: The Indonesian Experiences in Regional Perspective." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 40(2), August.